

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKj-IP)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

TAHUN 2021



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izinNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah telah selesai disusun.

Penyusunan LKj-IP ini adalah bagian penting dari proses akuntabilitas yang terus dipertahankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena itu penulisan dan penyusunan LKj-IP ini sangat mempertimbangkan format-format sesuai aturan, bahan-bahan pendukung indikator serta analisa masalah dan solusi yang telah dilakukan dalam proses pencapaian target. Namun demikian, kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa, banyak yang perlu dikritisi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada masa mendatang.

Akhirnya, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan pihak-pihak terkait atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Tengah



H. SUHARTONO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 196604121993031009

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas, Fungsi SKPD	1
I.2 Data Kepegawaian.....	2
I.3 Struktur Organisasi SKPD.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
II.1. Rencana Strategis SKPD.....	6
II.4 Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD.....	12
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD.....	13
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya	16
III.4 Akuntabilitas Keuangan.....	20
BAB IV PENUTUP	24

LAMPIRAN

CASCADING KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 – 2021 yang dilakukan pada tahun 2018. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Disperindag menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten *Lombok Tengah* menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Kinerja					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya omset perdagangan	Persentase Peningkatan nilai omset pedagang pertahun	14%	14%	100%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM	Presentase Peningkatan Nilai Produksi Pertahun	35%	35%	100%

Dari ilustrasi tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya omset pertahun dengan indikator Persentase peningkatan nilai omset pedagang pertahun disimpulkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Begitu halnya dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dengan indikator Persentase peningkatan Nilai produksi juga berhasil dilaksanakan melampaui target.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah., sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* No. 76 Tahun 2016 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.

1.2 Data Kepegawaian

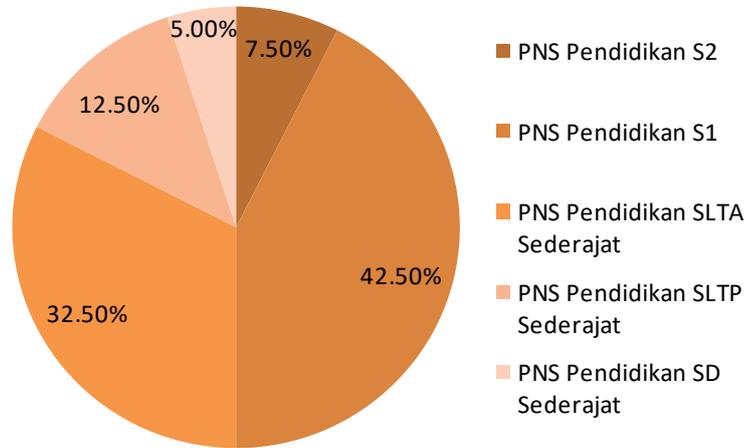
Jumlah Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per Desember 2021 sebanyak 51 orang dengan jumlah PNS sebanyak 40 orang (Daftar DUK Terlampir) dan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 11 orang. Rasio jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan Tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai PNS dan PTT Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	PEGAWAI	
		JUMLAH (orang)	%
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40	
1	PNS Pendidikan S2	3	7.50%
2	PNS Pendidikan S1	17	42.50%
3	PNS Pendidikan SLTA Sederajat	13	32.50%
4	PNS Pendidikan SLTP Sederajat	5	12.50%
5	PNS Pendidikan SD Sederajat	2	5.00%
II.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	11	
1	PTT Pendidikan S2	0	0
2	PTT Pendidikan S1	0	0
3	PTT Pendidikan SLTA Sederajat	11	100.00%
4	PTT Pendidikan SLTP Sederajat	0	0
5	PTT Pendidikan SD Sederajat	0	0
	Jumlah PNS dan PTT	51	

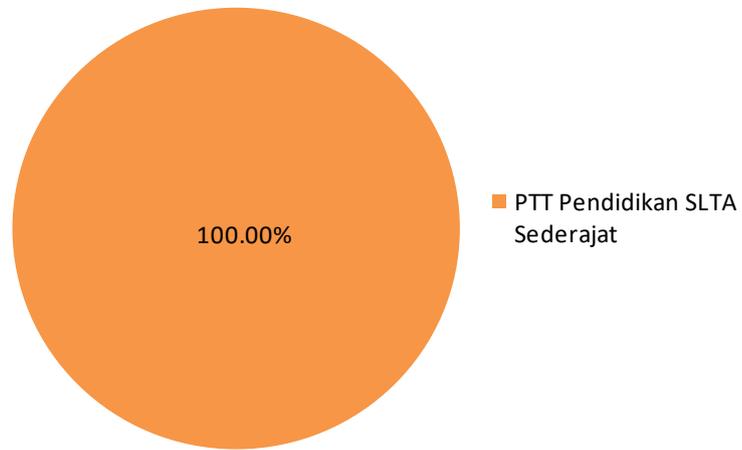
DIAGRAM 1.1
Persentase Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah



- PNS latar belakang pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 7,50% dari total 40 orang PNS
- PNS latar belakang pendidikan S1 sebanyak 17 orang atau 42,50% dari total 40 orang PNS
- PNS latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 13 orang atau 32,50% dari total 40 orang PNS
- PNS latar belakang pendidikan SLTP sebanyak 5 orang atau 12,50% dari total 40 orang PNS
- PNS latar belakang pendidikan SD sebanyak 2 orang atau 5,00% dari total 40 Orang PNS

Adapun jumlah PTT yang bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 11 orang dengan berbagi jenjang pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

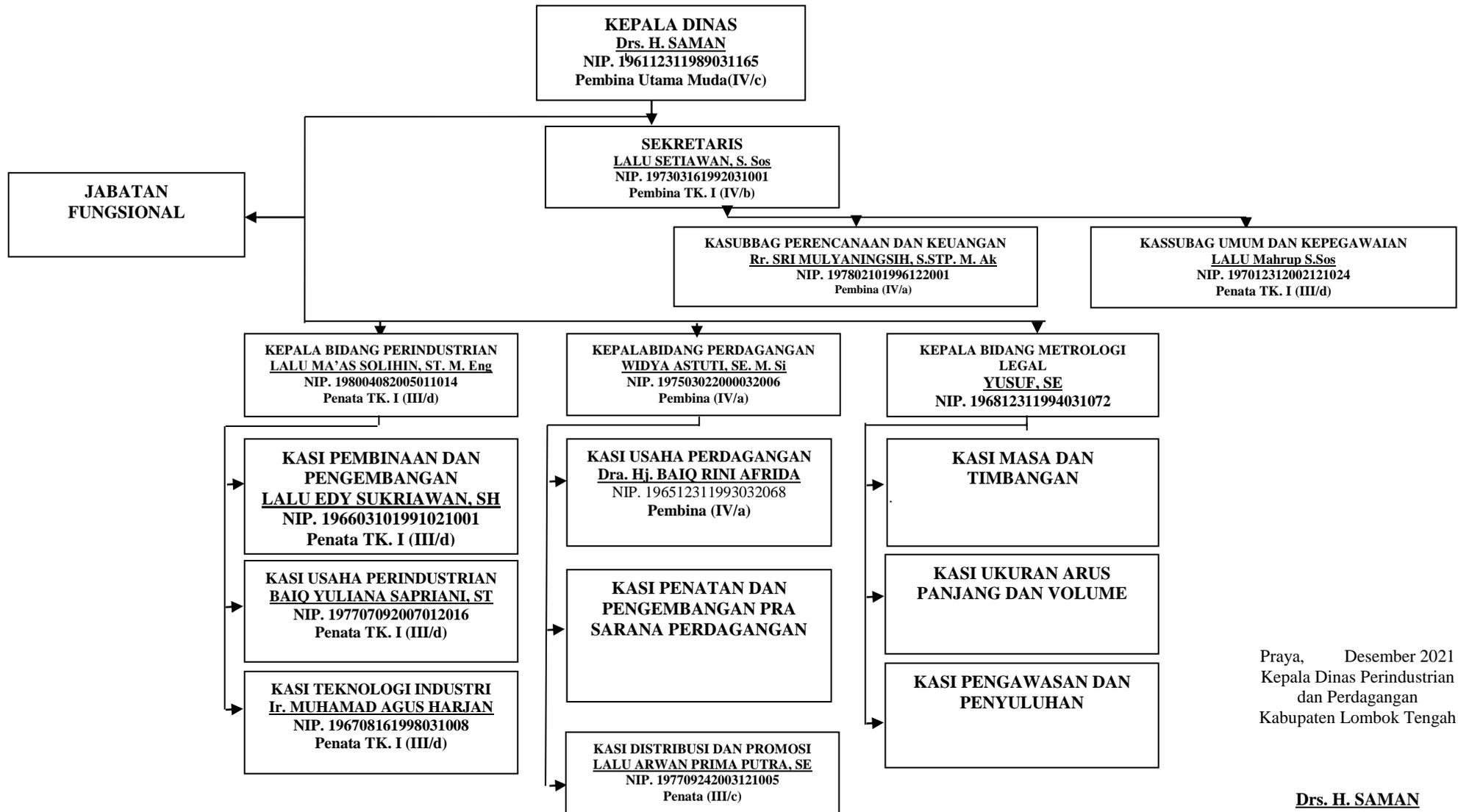
Diagram 1.2
Persentase Jumlah Pegawai PTT Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah



- PTT latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 11 orang atau 100,00% dari total 11 orang PTT

1.3 Struktur Organisasi OPD

Bagan 1.1
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PER 31 DESEMBER 2021**



Praya, Desember 2021
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Lombok Tengah

Drs. H. SAMAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
- 3) Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas
- 4) Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu **“Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas KAMTIBMAS”**, Dan misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan “Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah”.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah adalah “ ***Meningkatnya Nilai Perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah***”.

Tabel 2.1
KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>INDIKATOR</i>
Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	1. Meningkatnya omset perdagangan pertahun	<i>Persentase peningkatan omset pertahun</i>
	2. Meningkatnya nilai produksi IKM pertahun	<i>Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM</i>

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten *Lombok Tengah* sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya omset perdagangan pertahun
 - Strategi : Peningkatan perdagangan di pasar rakyat
 - Kebijakan : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan barang/jasa melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional
Intensifikasi tera/tera ulang alat UTTP
2. Sasaran 2 : Meningkatnya nilai produksi IKM pertahun
 - Strategi : Peningkatan produksi IKM
 - Kebijakan : Peningkatan daya saing IKM melalui edukasi, fasilitasi, dan perluasan pasar

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program/kegiatan dan Sumber Dana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KET.
I	<i>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</i>	
1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat klaster industri	DAU + DAK
2	Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerajinan	DAU
3	Peningkatan promosi produk unggulan daerah	DAU
4	Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis agro	DAU + DBHCHT
5	Peningkatan sarana produksi bagi industri kecil dan menengah (IKM)	DAU
6	Pengembangan Mutu Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	DAU
II	<i>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</i>	
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	DAU + DBHCHT
2	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan	DAU
3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	DAU
4	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	DAU
5	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	DAU
6	Sinkronisasi kemetrolgian legal	DAU

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun pertama Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian

kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARANSTRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (2021)
1	2	3
Meningkatnya omset perdagangan pertahun	Persentase peningkatan omset pedagang pertahun	0.14
Meningkatnya Nilai Produksi pertahun	Meningkatnya nilai produksi IKM pertahun	0.35

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. **23.761.157.889,00** (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai >100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGATKURANG

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN1 : Meningkatnya omset perdagangan pertahun

Sasaran No1 tersebut diukur dengan 1 (Satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Peningkatan omset Pedagang Pertahun. Adapun capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No1 Tahun2021.

No	Indikator Kinerja	Sat.	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Target renstra		Target RENSTRA 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
1	Persentase Peningkatan Omset Pertahun	%	14%	14%	100%	12%	14%	14%	Bidang Perdagangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya omset perdagangan pertahun dengan indikator Persentase Peningkatan Omset Pertahun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghasilkan capaian kinerja sebesar 14% dari target persentase peningkatan 14%. Ini menunjukkan tingkat capaian sebesar 100 %, dengan kriteria BAIK. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dengan nilai capain sebesar 12 %.

Beberapa kondisi yang diyakini sangat berdampak pada tingkat pencapaian omset pedagang adalah sebagai berikut:

1. Bantuan untuk masyarakat miskin akibat adanya pandemi covid-19, sehingga terjaganya daya beli masyarakat.
2. Turunnya angka penyebaran covid-19 sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan normal
3. Adanya Pertamina mandalika internasional circuit yang mengakibatkan meningkatnya kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri sehingga meningkatnya peredaran barang dan jasa di lombok tengah

b. SASARAN 2 : Meningkatkan Nilai Produksi pertahun

Sasaran No2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yaitu *Persentase Peningkatan nilai produksi IKM*. Capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No2 Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Sat	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Target renstra 2021	Sumber Data
						2019	2020		
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
1	<i>Persentase Peningkatan nilai produksi IKM</i>	%	35%	35%	100%	29%	35%	35%	Bidang Industri

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya nilai produksi pertahun dengan indikator *Persentase Peningkatan nilai produksi IKM* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja sebesar 35% dari target 35%. Ini menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%. dengan kriteria Baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 33%.

Pencapaian indikator persentase nilai produksi tahun 2021 dikarenakan karena:

1. Peningkatan dana bantuan untuk IKM dalam pengurusan PIRT, HKI dan label halal
2. Peningkatan bantuan sarana produksi untuk IKM
3. Adanya Pertamina mandalika internasional circuit yang mengakibatkan meningkatnya kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri sehingga meningkatnya peredaran barang dan jasa di lombok tengah

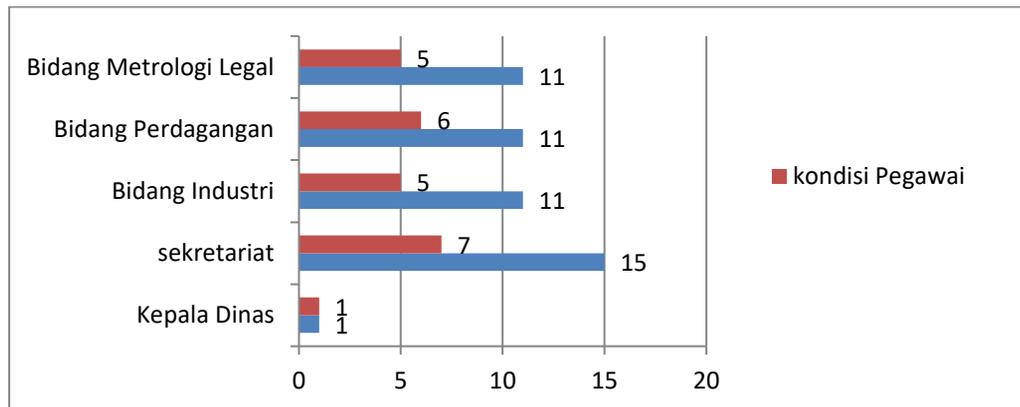
III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Chart 3.1

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2021, Disperindag mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Kekurangan Sumber Daya Aparatur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan justru menjadi pemicu bagi pegawai untuk dapat bekerja sama tanpa harus mengedepankan ego sektoral. Misalnya pada pembentukan kepanitian untuk pelatihan dan pendampingan IKM di Bidang Industri yang selalu melibatkan pegawai di Bidang lainnya bahkan bekerjasama dengan akademisi dan konsultan PLUT bahkan dengan IKM-IKM yang sudah mampu berdiri sendiri. Sedangkan di Bidang Perdagangan, upaya memaksimalkan kinerja juru pungut yang tidak sekedar menjalankan penarikan retribusi semata namun juga dibebankan untuk melakukan pendataan di pasar-pasar se Kabupaten Lombok Tengah.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja yang sangat baik dipengaruhi oleh pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti:

1. Pembangunan sentra industri sengkerang di desa sengkerang melalui dana DAK.

Strategi lainnya dalam rangka mencapai target peningkatan nilai produksi adalah dengan mengoptimalkan bantuan mesin dan peralatan industri bagi IKM-IKM yang sudah dibina baik mikro, kecil maupun menengah. Pemberian bantuan peralatan dan mesin selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembinaan IKM. IKM-IKM

yang telah dibina diberikan bantuan mesin dan peralatan bahkan diupayakan mengusulkan bantuan tersebut melalui anggaran pusat dan provinsi. Karenanya, tidak jarang dengan fasilitasi tersebut, IKM-IKM Lombok Tengah menerima bantuan dari Pemprov NTB maupun langsung dari Pusat.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi di Sektor Publik pada hakekatnya berbeda dengan sektor Swasta yang perhitungannya berdasarkan cost dan benefit. Kaldor-Hicks mengatakan bahwa efisiensi sektor publik adalah jenis efisiensi ekonomi yang berupaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kemanfaatan masyarakat sebanyak-banyaknya. Karenanya efisiensi sektor publik dilakukan tidak hanya dengan menekan pengeluaran anggaran seefektif mungkin akan tetapi harus mampu menjamin kemakmuran masyarakat secara merata.

Postur anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021 adalah sebesar **23.938.752.889,00** (*Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) naik Rp 19.574.232.689 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp Rp. **4.186.925.200,00**. Penurunan tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19.

Pada tataran perencanaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan efisiensi keuangan dengan cara mengupayakan perencanaan berbasis kinerja. Indikator kinerja dalam hal ini diidentifikasi untuk dihitung kebutuhan anggaran yang disiapkan. Karena itu, postur anggaran Disperindag dibagi ke dalam 3 kebutuhan utama yaitu:

1. Kebutuhan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas yang secara teknokratik telah tertuang pada RPJMD dan dibreakdown di dalam Renstra Dinas.

2. Anggaran untuk kebijakan menangani isu-isu strategis seperti pengurangan angka kemiskinan.
3. anggaran yang terkait dengan hasil Musrenbang Kabupaten.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.985.914.171	2.852.875.512	95,5
	KEGIATAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.515.429.445	2.382.882.286	94,7
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.515.429.445	2.382.882.286	94,7
	KEGIATAN Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	470.484.726	469.993.226	99,9
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	470.484.726	469.993.226	99,9
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	117.860.287	87.299.391	74,1
	KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.860.287	87.299.391	74,1
	Pameran Dagang Nasional	117.860.287	87.299.391	74,1
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	198.598.126	198.597.991	100
	KEGIATAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	198.598.126	198.597.991	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	162.031.146	162.031.146	100
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	36.566.980	36.566.845	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.450.741.828	4.679.921.246	85,9
	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.945.730	120.323.295	93,3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.661.830	41.616.830	99,9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.843.400	46.265.965	84,4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.440.500	32.440.500	100
KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.218.349.413	3.819.176.150	90,5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.183.966.413	3.784.793.150	90,5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.765.000	9.765.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24.618.000	24.618.000	100
KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.774.933	97.237.544	91,9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.188.933	48.162.979	99,9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.530.000	25.530.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.056.000	23.544.565	73,4
KEGIATAN Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	883.026.552	588.748.087	66,7
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	817.026.552	522.748.087	64,0
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000	66.000.000	100
KEGIATAN Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	114.645.200	103.510.735	90,3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.545.200	96.410.735	89,6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	7.100.000	100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.185.638.477	13.598.257.367	89,5
KEGIATAN Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.185.638.477	13.598.257.367	89,5
Koordinasi Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	358.496.339	256.464.786	71,5
Koordinasi Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.498.994.847	2.631.114.202	75,2
Koordinasi Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11.328.147.291	10.710.678.379	94,7

Penyerapan anggaran belanja langsung Disperindag 2021 sebesar 90 % dari jumlah anggaran Rp 23.938.752.889 Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan,

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya omset perdagangan	Persentase peningkatan nilai omset perdangan pertahun	14	14	100	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3,103,774,458.00	2,945,174,903.00	84,8
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM	Presentase peningkatan nilai produksi pertahun	35	35	100	Pengembangan IKM	15.185.638.477	13.598.257.367	89,5
% Rata-rata capaian					100				

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

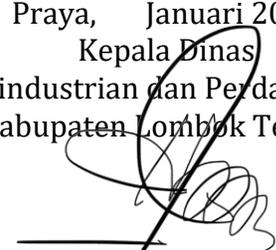
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelaporan yang akuntabel kepada publik berkaitan dengan realisasi pencapaian kinerja Disperindag pada tahun 2021, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya serta analisa permasalahan yang dihadapi, efisiensi keuangan dan akuntabilitas keuangan serta inovasi dan serta solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil analisa diperoleh rata-rata persentase penurunan terhadap kedua indikator sasaran yaitu persentase peningkatan omset perdagangan maupun persentase peningkatan nilai produksi IKM yaitu sebesar 100 % dengan kriteria "BAIK".

Akhirnya, kami berharap LKj-IP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kami yakin bahwa tiada hal yang sempurna seperti juga penyusunan laporan ini, karenanya kami sangat mengharapkan masukan dan kritik membangun untuk kesempurnaan laporan ini.

Praya, Januari 2022
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Tengah



H. SUHARTONO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 196604121993031009

